

# PERSOALAN MALADMINISTRASI, BANSOS ANGGOTA DPRD KOTA MATARAM TAHUN 2023 YANG JADI TEMUAN BPK

## Kliping Berita



Baiq Nelly Kusumawati. (HARLI/LOMBOK POST)

**L**ombokPost-Penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari salah satu anggota DPRD Kota Mataram Tahun 2023 belum dikembalikan.

Inspektorat Kota Mataram sudah memanggil untuk mengklarifikasi adanya temuan tersebut.

”Belum dikembalikan,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram Hj Baiq Nelly Kusumawati.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK Nomor: 152.A/LHP/XIX.MTR/05/2024 ada temuan penyaluran Bansos yang tidak sesuai. Total Bansos Rp 590 juta tidak diyakini kebenarannya.

Bansos tersebut disalurkan salah satu anggota DPRD Kota Mataram ke 590 penerima. Per orang mendapatkan Rp 1 juta. Penyalurannya pun melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram.

Penyalurannya dilakukan secara kelompok. Per kelompok diisi 10 orang. Jadi, per kelompoknya mendapatkan Rp 10 juta. Tetapi, secara administratif, proposal dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) hanya mengatasnamakan individu.

”Persoalan itu masuk ranah maladministrasi,” ujarnya.

Jika terjadi persoalan administrasi, tidak perlu dikembalikan. Tinggal dilakukan proses evaluasi yang dilakukan. ”Tidak ada pengembalian yang harus dilakukan,” tegasnya.

Inspektorat juga sudah mengkonfirmasi terhadap penerima. Mereka semua sudah menerima dana Bansos tersebut.

”Artinya, penyaluran sudah dilakukan. Kalau persoalan administrasi kita akan evaluasi,” terangnya.

Yang dikhawatirkan sebenarnya apabila penerima tidak menerima bansos sama sekali. Lalu anggaran itu sudah dicairkan.

”Itu baru bermasalah dan harus dikembalikan,” jelasnya.

Evaluasi yang sudah dilakukan adalah Pemkot Mataram membentuk Peraturan Wali Kota (Perwal). Itu sudah dibahas dengan legislatif.

”Informasinya pada Perwal tersebut penerimaan bansos tidak disalurkan dalam bentuk uang. Melainkan dalam bentuk barang,” terangnya.

Ada beberapa pengecualian jika Bansos disalurkan dalam bentuk uang. Misalnya, untuk pemberian bantuan yayasan anak yatim dan sebagainya.

”Saya kurang hafal pengecualian Bansos dalam bentuk uang,” ungkapnya.

Yang pasti, tujuan dibuatnya Perwal penyaluran Bansos itu sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK. Sebagai pedoman penyaluran Bansos.

”Supaya tidak lagi menjadi temuan,” kata Nelly. (arl/r3)